

DAFTAR PUSTAKA

• BUKU

- Abdullah, M., & Achmad, R. (1983). *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Abdullah, M., & Soekanto, S. (1982). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Sinar Jaya. Surabaya
- Achmad Ali. (2008). *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Kencana Media Group.
- Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Al Chaidar Zulfikar Salahudin Herdi Sahrasad. 2000. *Federasi atau Disintegrasi*. Yogyakarta: Madani Press,
- Ali, M. (2012). *Hukum Pidana Terorisme: Teori Dan Praktik*.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Sinar Grafika.
- Anak Agung Gede Oka Parwata, S.H., M.Si, 2016, *Memahami Hukum dan Kebudayaan*, Pustaka Ekspresi, Bali,
- Anwar, Y. (2008). *Pengantar sosiologi hukum*. PT. Grasindo.
- Atmadja, I Dewa Gede And Budiarta, I Nyoman Putu (2018) *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, Malang, Indonesia.
- Atmasasmita, R. (2013). *Kapita selekta kejahatan bisnis dan hukum pidana*. PT. Fikahati Aneska.
- Aziz, N. L. L., & Zuhro, R. S. (Eds.). (2018). *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Badudu, Y., & Zain, S. M. (1994). Kamus umum bahasa Indonesia. Pustaka Sinar Harapan.
- Buchari, S. A. (2014). Kebangkitan etnis menuju politik identitas. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1),
- Chairuddin, 1991, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2008.
- Dherana, Tjokorda Raka, 1982, *Peranan Hukum Dalam Kebudayaan*, Denpasar: UP. Vista Vira.
- Djelantik, S. (2010). *Terorisme: tinjauan psiko-politis, peran media, kemiskinan, dan keamanan nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Frans Maniagasi. 2001. *Masa Depan Papua*. Jakarta: Millennium Publisher
- Gesmi, I., Sos, S., & Yun Hendri, S. H. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hendropriyono, A. M. (2009). *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Penerbit Buku Kompas.
- Hisyam, C. J. (2021). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bumi Aksara. Hal. 108
- Hurwitz, S. (1986). *Kriminologi*, saduran Ny. Moeljatno, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Idris, I. (2018). *Deradikalisasi: Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme (Vol. 1)*. Penerbit Cahaya Insani.
- Indrayana, D. (2007). *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka.

- Irwan Gesmi dan Yun Hendri, Buku Ajar Pendidikan Pancasila, (Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2018),
- JRG. Jopari. 1993. Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,
- K. Wantjik Saleh, Kehakiman dan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. Stora Grafika.
- M.Khozin, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial Lawrence M. Friedman, The Legal system A Social Science Perspective, Nusa Media , Bandung,
- M.Kozhin , 2019 Terjemahan : Friedman, L. M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Nusamedia.
- Manullang, E. F. M. (2017). Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum. Prenada Media.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT Alumni, 2003,
- Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
- Montratama, I. (2018). Terorisme Kanan Indonesia. Elex Media Komputindo.
- Musakkir. 2013, Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam perkara Pidana “suatu tinjauan sosiologi hukum dan Psikologi hukum”, Rangkang Education. Jogjakarta.
- Nainggolan, P. P., Muhamad, S. V., & Hidriyah, S. (2019). Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Navarro, J. A. Pengaruh Kesenjangan Sosial Terhadap Perubahan Pola Pikir Masyarakat Mengenai Paham Terorisme Di Indonesia
- Ningrat, K. (1983). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia

- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. CV. Mitra Cendekia Media.
- Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007),
- Poerwadarminta, W. J. S. (1991). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.
- Pramono, B., Supartono, I., & Mm, C. (2022). Hukum Humaniter. Scopindo Media Pustaka.
- Prodjodikoro, W. (1989). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Bandung : Eresco,
- Rachma, A. D. (2020). Perbandingan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Terorisme Di Indonesia Dan Filipina (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Rahardjo, S. (1986). Ilmu hukum, alumni. Bandung.
- Remaja, N. G. (2014). Makna hukum dan kepastian hukum. Kertha Widya, 2(1).
- SA, A. W. G., & SH, M. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Penerbit Andi.
- Saafoedin Bahar. 1996. Integrasi Nasional. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Sarwono, S. W. (2012). Terorisme di Indonesia: Dalam tinjauan psikologi. Pustaka Alvabet.
- Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta UI Press.
- Sofian, A. (2018). Ajaran kausalitas hukum pidana. Prenada Media.
- Stanley L.Paulson, (2019).terjemahan cetakan: Il-Hart, H. L. A. Konsep hukum. Nusamedia.
- Sunardi, S., Wahid, A., & Tanuwijaya, F. (2017). Terorisme dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Internasional, nirwana media, Jakarta.
- Sunarso, H. S., SH, M., & Kn, M. (2022). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Sinar Grafika.

- Syafrinaldi, Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional, Makalah, Workshop tentang Urgensi Amendemen Undang-Undang Anti Terorisme, Yogyakarta, 21-23 April 2003.
- Syamsudin Haris. 1999. Indonesia di Ambang Perpecahan. Jakarta: Erlangga,
- Syarief, F. (2020). Buku: Budaya Organisasi & Kewirausahaan.
- T. Heru Kasida Brataatmaja, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1993,
- Tanaka, N. A. 2019, Antropologi Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang
- Tore Bjorgo (ed.), Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward (London and New York: Routledge, 2005),
- Tuhana Taufiq A. 2001. Mengapa Papua Bergolak. Yogyakarta: Gama Global Media
- Utsman, S. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research). Pustaka Pelajar.
- Waluya, B. (2007). Sosiologi: Menyelami fenomena sosial di masyarakat. PT Grafindo Media Pratama.
- Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974,
- Wiyono, R. (2022). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sinar Grafika.
- Yakobus F Dumupa. 2006. Berburu Keadilan di Papua. Yogyakarta: Pilar Media,
- **JURNAL**
- Ahmadin, A. (2018). Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Pendidikan Ips, 8(2), 105-111.

- Aina, A. (2002). Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Upaya Penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*, 1(1).
- Aminullah, A. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 3(1), 620-628.
- Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 51-65.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895
- Deda, A. J., & Mofu, S. S. (2014). Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di provinsi Papua Barat sebagai orang asli Papua ditinjau dari sisi adat dan budaya: Sebuah kajian etnografi kekinian. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2).
- Edi setiadi, Politik Kriminal (Criminal Policy) Tentang Kejahatan Terorisme Pasca Putusan mahkamah Konstitusi, Volume XXI No. 2 April – Juni 2005 : 231 – 249,
- Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 854–869.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19
- Gault-Williams, M. (1987). Organisasi Papua Merdeka: The Free Papua Movement Lives. *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 19(4),
- Hutagalung, M. (2007). Budaya malu, budaya salah, dan budaya hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(3), 359-380
- Ilmiawan, I. (2015). Sejarah Musik Kalero Sebagai Aktivitas Kultural Sosial Masyarakat Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 1(2).

- Mishael, G., Setiyono, J., & Hadiwinoto, S. (2016). Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-12.
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2).
- Nuridawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 2(01), 152-170
- Prasetyo, Y. A. (2015). Potret Pers dan Media di Papua: Belum Hadir Memenuhi Hak Atas Informasi. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 12(12), 52-92.
- Setyadi, Y., & Saputra, O. (2022). Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Berat Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur. *Journal Of Law And Nation*, 1(2), 106-115
- Soetriadi, E. (2008). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Suryowati, D. (2013). Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 67-84
- Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. (2020). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 172-189.
- Widowati, C. (2013). Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150-167.

Windiani, R. (2017). Peran Indonesia dalam memerangi terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135-152

● **ARTIKEL**

Achyar, M. (2019). Rekonstruksi Kewenangan OJK Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Agung Djojosoekarto, dkk, 2012, Nilai-Nilai Dasar Orang Papua dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance): Studi Reflektif Antropologis (Yogyakarta : Kemitraan Partnership,), 12-13.

Al-Anezi, R., Law, A. M. L., Act, A. T., Law, A. T., Arar, M., Arfawi, K., & Al-Assad, B. See also Arab Convention for the Suppression of Terrorism anti-terrorism experience of, 138–9 authoritarian ambition of, 216–18 French influencing.

1Alexander, Y. (1978). Terrorism, the media and the police. *Journal of International Affairs*, 101-113.

Ali, I., & Wekke, I. S. (2021). Budaya, Agama, dan Kepercayaan Suku Pelaut di Papua Barat, Indonesia. *Samudra Biru*.

Alifia Qonita, Defining Terrorism in International Law, Vol. 8, October 2010, hlm. 189.

Ardison Asri, A. (2019). Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*

Asatawa, I., & Ari, P. (2017). Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. *Makalah Fakultas Peternakan, Universitas Udayana*

Asatawa, I., & Ari, P. (2017). Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. *Makalah Fakultas Peternakan, Universitas Udayana*.

Atmasasmita, R. (1989). *Asa-asas perbandingan hukum pidana*

Atmasasmita, R. (2002). *Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia*. Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional

- Bambang Harimurti. 1984. Mei. "Setelah Sinterklaas Membangun Irian".
Tempo. 14-15.
- Basri, B., Hendrawati, H., & Kurniaty, Y. (2015). Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan.
- Budiman, M. (2003, December). Jatidiri Budaya dalam Masyarakat Multikultural. In Makalah dalam Seminar Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perspektif Budaya, diselenggarakan Dep. Kebudayaan dan Pariwisata, Bogor
- Cahyo Pamungkas et al., Pembangunan, Marginalisasi, Dan Disintegrasi Papua (Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, 2020), 133–135.
- Cahyo Pamungkas, (2014). Toleransi Beragama Dalam Praktik Sosial Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng, jurnal Epistemé, Vol. 9, No. 2,
- Damayanti, A., Hemay, I., Aziz, S. A., & Pranawati, R. (2013). Perkembangan Terorisme di Indonesia.
- Devi Ariyani. (2015). Fenomena Gerakan Radikalisme ISIS di Indonesia: Analisis Isi terhadap pemberitaan media online Mengenai Gerakan ISIS di Indonesia, Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah.
- Dirdjosisworo, S., & Simanjuntak, B. (1969). Doktrin-doktrin kriminologi: teori teori tentang sebab musabab kejahatan dan mashab-mashab nya, disusun oleh Soedjono D. dan B. Simandjuntak. Alumni.
- Effendi, T., & Panjaitan, A. C. D. (2021). Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana.
- Faisal, B. I. (2020). Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Fathurrohman Siliwangi, et.al, "Tinjauan Yuridis Kelompok Kriminal Bersenjata Terhadap Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2018.
- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut john rawls. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 9(2), 30-45.

- Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(2), 376-393.
- Fitriyanto, R. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Riau Perspektif Kriminologi (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Ghosiyah, L. (2018). Analisis Putusan Mk Nomor 1/Phpu/2014 Tentang Sistem Noken Di Papua Ditinjau Dalam Perspektif Demokrasi.
- Gunaratna, R. (Ed.). (2005). *The changing face of terrorism*. Marshall Cavendish International.
- Gurumis, G. S. (2022). Upaya Pencegahan Konflik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. *Lex Administratum*.
- Hadi, M. M. (2009). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Hasan, H., & Nugroho, Z. (2022). Menuju Papua Damai dengan Pendekatan Pembangunan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 56-66.
- Hasim, H. (2019). Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme. *Mazahibuna*.
- Henny Warsilah, 2015, "Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah," *Jurnal Masyarakat & Budaya*
- Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, yang ditulis dalam jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 23, No. 2, Juni 2011
- Huda, M. C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*
- I Nyoman Sudira et al., 2021, *Membangun Fondasi Perdamaian Di Papua: Studi Kasus Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Dan Infrastruktur*, ed. Dara Sheila Mercyana (Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor).
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2008). Ideologi, Pancasila, dan konstitusi. *Mahkamah Konstitusi*, 10-23.

- Jimly Assidique, "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional", Mahkamah Konstitusi, E-Book, 2005.
- Jost, J. T. (2006). The end of the end of ideology. *American psychologist*, 61(7), 651.
- Juergensmeyer, M. (2017). *Terror in the mind of God: The global rise of religious violence* (Vol. 13). Univ of California Press.
- Kambo, G. A. (2022). *Sosiologi Politik sebagai Bahan Ajar*. Humanities Genius.
- Kartanegara, S. (1960). *Hukum pidana: kumpulan kuliah*. Balai Lektor Mahasiswa
- Kasjim, K. (2008). *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Kasmawati, A., & Rahman, A. Q. (2015). *Membangun Budaya Hukum Menunjang Revolusi Mental Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial*
- Krisnan, J. (2008). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (2010). *Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*. Nuansa Aulia
- Leirissa, R. Z. (1992). *Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Ivira Rumkabu, "Opresi Dan Emansipasi Papua: Sebuah Refleksi Bersama Muridan," in *emansipasi Papua: Tulisan Para Sahabat Untuk Mengenang Dan Menghormati Muridan S. Widjojo (1967-2014)*, ed. Riwanto Tirtosudarmo and Cahyo Pamungkas (Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor, 2021).
- M. Adnan Amal, 2006, *Kepulauan Rempah-Rempah- Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950*, wire media Group, Surabaya
- Mambraku, N. S. (2016). *Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik*. *Kajian*, 20(2), 75-85.

- Mangku, D. G. S. (2022). Perubahan Status Dari Gerakan Separatisme Menjadi Gerakan Terorisme Pada Organisasi Papua Merdeka (Opm): Sebuah Analisis. Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Radikalisme Dan Separatisme, 54.
- Marten Nappang, 2021, Tinjauan Yuridis Normatif penetapan kelompok Kriminal bersenjata (KBB) di papua sebagai kelompok teroris, Studi Organisasi Papua Merdeka dan Uighur, Pusat Riset Ilmu Kepolisian Kajian Terorisme
- Monograf, Revisi Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002, Habibi Center, Bandung.
- Mudzakir, (2001) "Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", Disertasi FH-UI, Jakarta, hlm. 21. Lihat juga IGM Nurjanah
- Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol, 24(3).
- Muridan S. Widjojo, 2016, "Nationalist and Separatist Discourses in Cyclical Violence in Papua," Asian Journal of Social Science 34, no. 3 .
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 1(2), 187-207.
- Nainggolan, P. P., Hariyadi, H., Suhartono, S., Muhamad, S. V., Wangke, H., & Pujayanti, A. (2002). Terorisme dan tata dunia baru. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Nainggolan, R. S. (2022). Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (Kbb) Menjadi Teroris Di Papua. Lex Privatum, 10(5).
- Nainggolan, R. S. (2022). Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (Kbb) Menjadi Teroris Di Papua. Lex Privatum, 10(5).
- Nasoha, A. M. M. (2013). Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia.
- Ngurah Karyadi, Memahami Motif Peristiwa Bom Bali, Bali Post, 22 Oktober 2002.

- Ningsih, I. S. (2021). Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara.
- O.C. Kaligis & Associates, Terorisme, tragedy Umat manusia, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2003
- P.A.F Lamintang, 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Parengkuan, F. V. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Pasal 355 Kuhp. *Lex Crimen*, 10(4).
- Parera, A. M., Usmany, D. P., & Sinaga, R. (2013). Sausapor saksi sejarah perang dunia II di kabupaten Tambrauw provinsi Papua Barat. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Parthiana, I. W. (2002). Hukum perjanjian internasional. Mandar Maju.
- Pasulle, J. L. (2019). Konflik Dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Patiran, G., Setyabudi, C. M., & Mayastinasari, V. (2022). To Win The Heart And Mind The People Of Papua: Fungsi Dan Peran Brimob Dalam Operasi Damai Cartenz 2022. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2).
- Prakoso, A. (2017). Sosiologi hukum. Lecturer Scientific Publication (Publikasi Ilmiah) Lsp-Books, LSP-Books [717], Repository Universitas Jember,
- Prasetya, A., Nurdin, M. F., & Gunawan, W. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal. *Sosietas*, 11(1), 929-939.
- Puspita, Y. (2018, July). Pentingnya Pendidikan Multikultural. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgri Palembang* (Vol. 5, No. 05).
- Ramadan, I. (2020). Buku terorisme dan jihad tinjauan hukum dan sosial keagamaan.
- Rohim, N. (2014). Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan. *Jurnal Fiat Justitia*, 8(1), 80-97.
- Rubba Kulhawy, 2015, "Sejarah Dakwah di Merauke Provinsi Papua", dalam *Dakwah Islam PesanMoral Amin Masyhur* (Yogyakarta: Al-Amin)

- Sari, C. N. *Dinamika Atas Hubungan Budaya dan Kebudayaan Hukum*.
- Sartika manggabarani, 2012, *Masalah Papua Dalam Konteks Hubungan Indonesia Australia*, Artikel Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Shodiq, D., Shodiq, M. D., & SH, M. (2018). *Disertasi: Asas Kemanfaatan Hukum Deradikalisasi Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Jayabaya).
- Shughart, W. F. (2006). *An analytical history of terrorism, 1945–2000*. *Public choice*, 128(1)
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang pondasi kefilosofan dan sifat keilmuan ilmu*. Mandar Maju.hal.75 - Lihat juga IGM Nurdjanah,
- Sihombing, A. B. E. L. M. A. R. T. (2014). *Akibat Hukum Perdamaian Terhadap Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1104 K/Pid/2009)*.
- Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.
- Siregar, B., Suropto, B., Hapsoro, D., Lo, E. W., & Sugiyono, F. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Solahudin. (2011). *NII sampai Ji: Salafy jihadisme di Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Steve Koresy Rumagit, (2013). *Kekerasan Dan Diskriminasi Antar Umat Beragama Di Indonesia*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Jan-Mrt,
- Sugiyatno, M. N. *Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dalam Perspektif Subjek-107-132*.
- sukasta, s. (2022, september). *Aspek hukum tindak pidana terorisme menurut undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme*. In *prosiding seminar nasional hukum* (vol. 2, no. 1).

- Sunardi, Klausula Attentat Dalam Kaitannya Dengan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana
- Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. (2020). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 408-425.
- Tebay, N. (2016). Transformasi Konflik Papua. *Limen*, 12(2, April), 82-106.
- Terorisme, B. N. (2013). Perkembangan Terorisme di Indonesia. Deputi Pencegahan, Perlindungan, Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Terorisme. Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.
- Triatmoko et al., Policy Paper Pembenahan Otonomi Khusus Untuk Penyelesaian Konflik Papua
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32-48
- Vermonte, P. J. (2003). Menyoal globalisasi dan terorisme. *Terorisme: Definisi, aksi, dan regulasi*, 26-35.
- Walewski, P. (2004). Combating international terrorism: a study of whether the responses by the UK and US to the events of 9/11 are compatible with respect for fundamental human rights (Doctoral dissertation, University of British Columbia).
- Walker, C. (1992). The prevention of terrorism in British law. Manchester University Press.
- Wasistha, F. D. (2022). Penerapan Program Deradikalisasi Sebagai Alternatif Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Wayan, I. (2021). BUKU: Penciptaan Karya Seni Berbasis Kearifan Lokal Papua.
- Widi Susanto, I. (2014). Asas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara. *Humanika*, 20(2)
- Widyaningrum, W. Y. (2019). Menumbuhkan Nilai Kesadaran Pancasila di Kalangan Generasi Muda: Kajian Teoritis. *FISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(3)

Wisanti, L. K. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Sebagai Pelaku Cyberporn (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).

Yusuf, A., Khair, O. I., Kusuma, G. W., & Nasruddin, M. (2023). Implikasi Proses Hukum Yang Adil Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Dan Rekomendasi Kesejahteraan Sosial Di Papua. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 623-648.

Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 149-180.

Wisanti, L. K. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Sebagai Pelaku Cyberporn (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya)

- **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention the Suppression

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

- **WEBSITE**

KemenkoPolhukam, H. (2021). Menko Polhukam: Organisasi dan Orang-Orang di Papua yang Lakukan Kekerasan Masif Dikategorikan Teroris. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. <https://polkam.go.id/menko-polhukam-organisasi-orang-orang-papua-lakukan-kekerasan-masif/pada>

<https://kumparan.com/kumparannews/tni-sebut-ada-33-kelompok-separatis-di-papua-hanya-3-yang-bersenjata-1szF0DARa6K/full> diakses juli 2022

<https://news.detik.com/berita/d-5868067/92-aksi-teror-kkb-di-papua-selama-2021-67-korban-tni-polri-dan-warga> diakses pada 20 februari 2023 pukul 13. 00 Wita

<https://www.liputan6.com/news/read/3169651/menko-polhukam-ganti-nama-kelompok-bersenjata-di-papua-jadi-kksb>

<https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/papuan-separatists-vs-jihadi-terrorists-indonesian-policy-dilemmas>

<https://www.klikwarta.com/memaknai-pergeseran-istilah-separatis-ke-kelompok-kriminal-bersenjata>

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa?page=all>

<https://www.liputan6.com/news/read/3157420/kapolri-kkb-sudah-lama-ada-sejak-saya-kapolda-papua>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-soal-insiden-susi-air-pembakaran-pesawat-oleh-kkb-paling-parah-di-intan-jaya.html>

<https://www.solopos.com/aksi-kian-brutal-status-kkb-sebagai-teroris-masih-tunggu-putusan-pengadilan-1550278>